

**PELAKSANAAN PROGRAM KEMISKINAN, KEBODOHAN DAN
INFRASTRUKTUR (K2I) BANTUAN TERNAK KAMBING
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Riau)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syri'ah (S.E.Sy)**



DI SUSUN OLEH :

WAHYUDIN
NIM: 10725000177

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1432 H/2011 M**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, **Pelaksanaan Program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) Bantuan Ternak Kambing Menurut Perspektif Ekonomi Islam**. Penelitian ini bersifat penelitian (*Field Research*) di Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Riau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pelaksanaan program (K2I) bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai, dan Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Program (K2I) Bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapat bantuan ternak kambing yang berjumlah 50 orang, yang terdiri dari 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Sedangkan sebagai sampelnya penulis mengambil sebanyak 50% dari 25 orang, masing-masing diambil 5 orang setiap kelompok dengan menggunakan metode Random Sampling.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi yang diambil dari lokasi penelitian untuk melihat Pelaksanaan Program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) bantuan ternak kambing menurut perspektif ekonomi Islam, di tambah dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini Setelah dilakukan penelitian tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrasturuktur (K2i) Bantuan Ternak Kambing yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui usaha peternakan kambing kacang. Pola pemeliharaan kambing kacang adalah secara individu dimana setiap kelompok terdiri dari 10 orang perternak dan setiap kelompok mendapatkan bantuan 100 ekor kambing untuk 10 orang perternak. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan program K2I bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai yaitu: lokasi, persyaratan peternak, hak peternak. Program K2I yang diperuntukkan untuk masyarakat berekonomi menengah kebawah agar kemiskinan dan kebodohan dapat diminimalisir setelah diberikan pembinaan dan penyuluhan yang diadakan oleh pihak pelaksana sehingga dapat membantu taraf perekonomian masyarakat yang tidak mampu. Program K2I diperuntukkan bagi mayarakat miskin, dimana program K2I ini mengandung unsur tolong-menolong sesama manusia karena program ini tidak bersifat pinjaman tetapi bersifat hibah atau pemberian. Memberi dengan sukarela tanpa meminta imbalan apapun, hanya mengharap ridha Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul Kontribusi Pelaksanaan Program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) Bantuan Ternak Kambing Menurut Perspektif Ekonomi Islam(Studi Kasus Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Riau). Skripsi ini hasil karya ilmiah yang di susun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam (S.EI) oleh setiap mahasiswa strata satu (S1) Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda H. Sunarto dan ibunda Hj. Sukinah Yang telah memberikan motivasi, do'a, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor dan Pembantu Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dekan dan Pembantu dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

4. Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si dan Bapak Darmawantia Indrajaya, M.Ag sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan ekonomi Islam yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hertina, M. Pd, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Magfirah, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis penulis.
7. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
8. Seluruh Kakanda, abanganda dan seluruh ponaan yang penulis sangat menyayangi meraka. Yang telah memberikan motivasi, do'a, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat Bapak Styah Hendro sekeluarga, bang tuslat, bang Soleh, bang Can, kak Fitriani, kak Marni, mas Sontoso, Yono, Jepri dan Adlinah yang telah banyak memberikan dorongan, bantuan moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini, semoga selalu mendapat rahmat ALLAH Swt. Amin..
10. Para sahabat Mahasiswa Fakultas Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum khususnya jurusan Ekonomi Islam lokal 4 angkatan '07 Mukhlis, Siti Rufiah, Sri Setiawati, Susanti, Zai dan semua kawan-kawan satu lokal, jurusan, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, bantuan moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Amin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan saranya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 29 Desember 2011

Penulis

WAHYUDIN
NIM. 10725000177

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 9

E. Metode Penelitian..... 9

F. Sistematika Penulisa..... 10

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Demografis Desa Bandar Sungai 14

B. Mata Pencarian 15

C. Agama 16

D. Pemerintahan dan Pendidikan 18

E. Adat Istiadat 20

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

A. Gambaran umum tentang program kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur (K2I) bantuan ternak kambing	22
B. Kensep Kemiskinan	29
C. Kebodohan	35
D. Infrastruktur	37

BAB IV : PELAKSANAAN PROGRAM KEMISKINAN, KEBODOHAN DAN INFRASTRUKTUR (K2I) BANTUAN TERNAK KAMBING MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pelaksaan program kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur (K2I) bantuan ternak kambing Di Desa Bandar Sungai	43
B. Tinjauan ekonomi Islam terhadap Pelaksaan program (K2I) bantuan ternak kambing Di Desa Bandar Sungai	52

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 : Klasifikasi Penduduk Desa Bandar Sungai Menurut Jenis Kelamin.....	15
Tabel II. 2 : Klasifikasi Penduduk Desa Bandar Sungai Menurut Jenis mata pencarian.....	16
Tabel II. 3 : Klasifikasi Penduduk Desa Bandar Sungai Menurut Agama dan Kepercayaan	17
Tabel II. 4 : Klasifikasi Sarana Ibadah.....	17
Tabel II. 5 : Klasifikasi Sarana Pendidikan Desa Bandar Sungai	19
Tabel II. 6 : Klasifikasi Jenjang Pendidikan Desa Bandar Sungai.....	19
Tabel IV. 1 : Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan Ternak Kambing K2i Di Desa Bandar Sungai.....	45
Tabel IV. 2 : Tanggapan Responden Tentang Pembinaan Program Bantuan Ternak Kambing K2i Di Desa Bandar Sungai	46
Tabel IV. 3 : Tanggapan Responden Dalam Mamanfaatkan Program Bantuan Ternak Kambing K2i Di Desa Bandar Sungai.....	47
Tabel IV. 4 : Pengetahuan responden tentang program K2I bantuan ternak kambing di Desa Bandar sungai	48
Tabel IV. 5 : Tanggapan Responden Tentang Perekonomian Sebelum Adanya Program Bantuan Ternak Kambing K2i Di Desa Bandar Sungai	49
Tabel IV. 6 : Tanggapan Responden Tentang Perekonomian Sesudah Adanya Program Bantuan Ternak Kambing K2i Di Desa Bandar Sungai .	50

Tabel IV. 7 : Tanggapan Responden Tentang Resiko Sesudah Adanya Program

Bantuan Ternak Kambing K2I di Desa Bandar Sungai	51
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur secara detail mengenai apapun yang berkaitan dengan aktivitas dan sumber pendapatan serta perintah dan larangan baik secara individu, kelompok bahkan suatu Negara, Salah satu wujudnya Islam telah menugaskan Negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya Negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, Negara memberikan setiap individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja secara produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Namun ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri, atau tidak ada keadaan khusus dimana Negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua dimana Negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya¹.

Menurut Harry Calvert dalam buku mujahidin. Ekonomi Islam Jaminan Sosial adalah “Mekanisme utama yang sah berkaitan dengan pemberian jaminan untuk mencukupi penghasilan individu jika

¹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), Cet. Ke-1, h. 455

pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan pelayanan sosial lain, guna menjamin seseorang untuk memenuhi standar hidup minimal secara kultural yang layak apabila sarana yang biasa dilaksanakan mengalami kegagalan. Sedangkan dalam Islam sistem jaminan sosial berdasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Kesejahteraan dan harta itu milik Allah dan negara adalah wakil Allah, sehingga dalam menjalankan tugasnya negara harus dasar keimanan kepada Allah.
2. Negara memberikan jaminan sosial kepada seluruh warganya apabila masyarakat mematuhi peraturan negara².

Islam memandang bahwa tanggung jawab pemerintahan bukan terbatas kepada keamanan dalam negeri, dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian program masyarakat ideal, adil dan makmur. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah ekonomi.³ Negara diwajibkan pula mengontrol orang-orang yang boros, membantu orang yang kurang sempurna akal nya ataupun orang safih (bodoh) dalam membelanjakan hartanya, sekali pun miliknya sendiri, sampai mereka kembali berakal sehat atau sudah dapat dijamin kejujuran tindakanya.

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 98

³ *Ibid*, h. 113

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa'[4]:5:



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik,”⁴ (QS. An-Nisa’: 5)

Penyediaan lapangan pekerjaan juga merupakan kewajiban Negara. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW: “Seorang imam (pemimpin) adalah bagian pertanggung jawaban gembalaannya (rakyatnya)”. Dari berbagai referensi ini maka jelas bahwa kewajiban pemerintah adalah menanggung kesejahteraan warganya, jika Islam sangat menghargai hak hidup seorang warga, maka Negara berkewajiban pula mengupayakan kelangsungan hidup rakyatnya.

Dalam sejarah pemerintahan Islam baik pada masa Rasulullah saw, maupun pada masa *Khulafaur Rasyidin*, selalu menyediakan bantuan keuangan bagi fakir-miskin yang diambil dari *Bait al-Maal*. Dan Rasulullah Muhammad SAW. menyediakan pekerjaan bagi mereka yang mampu melakukannya dan menyediakan bantuan keuangan bagi merka yang sakit,

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2002), h. 77

cacat dan tidak mampu melakukan pekerjaan sendiri. Bahkan Rasulullah SAW, membayarkan hutang orang-orang miskin yang tidak mampu melunasi hutangnya.

Kemiskinan merupakan masalah negara ini, mengingat sebagian besar aktifitas penduduk bersifat agraris dengan modal yang sangat kecil. Kebanyakan masyarakat dari negara berkembang belum menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan karena masih kurangnya infrastruktur. Masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi tugas pemerintah untuk menindak lanjuti program-program yang telah dilaksanakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Pemerintah telah memberikan kekayaan Negara melalui berbagai program yang ditujukan kepada penduduk yang kurang mampu melalui pemberian subsidi dalam berbagai bentuk diantaranya dana BOS untuk pendidikan, raskin (beras untuk rakyat miskin), program kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur (K2I), dan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat miskin.

Kemiskinan merupakan orang yang serba kekurangan namun terbelit dalam lingkaran ketidakberdayaan, ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima seakan-akan tidak dapat dirubah. Hal ini tercermin didalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktifitas, terbatasnya

modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan dan kesempatan dalam pembangunan⁵.

Upaya mengentaskan kemiskinan ini, Islam menganjurkan agar yang bersangkutan menjadi orang yang berusaha dengan giat. Hal ini seperti yang termuat pada QS Al-Jumu'ah, 10:



Artiya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”⁶. (QS. Al-Jumu’ah: 10)

Berdasarkan ayat tersebut, perintah bertebaran di muka bumi, apabila waktu telah datang hentikan segala kegiatan. Bila Sholat Jum’at telah selesai maka kita dibolehkan untuk bergiat kembali, bertebaranlah di muka bumi itu: “Dan carilah karunia Allah” karena karunia Allah itu ada dimana-mana asal saja orang mau berusaha dan berkerja. Karunia dari bertani dan berladang, usaha dari menggembala dan berternak, usaha dari berniaga dan jual-beli, usaha dari bermacam-macam rezeki yang halal⁷.

Kesejahteraan akhirat, kita sudah sering mendapatkan pembahasannya. Sedangkan kebaikan dunia tidak bisa lepas dari terwujudnya

⁵ Sudiyono marzuki, *Program Pengentasan Kemiskinan Dengan Usaha Perternakan Itik Di Kabupaten Malang*, (Malang: Fakultas Perternakan Universitas Di Ponogoro, 2005), h. 1

⁶ Depag RI, *Op.Cit*, h. 554

⁷ Abdul Malik Abdulkarim Arimullah, *Tafsir Al-Azhra*, (Singapura: Karjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003), Jilid-10, Cet. ke-5, h, 7395

kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan harta. Jelas sekali orang yang miskin, terbelakang, bodoh, dan semacamnya tidaklah akan disebut baik atau berkualitas dalam hidupnya, dan ini semua tidak menjadi cita-cita Islam secara doktrinal.

Menurut Margareth dan Midgley, model pembangunan sosial pada dasarnya menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal, yakni peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui:

1. Upaya menumbuh kembangkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja.
2. Menyediakan dan memberikan pelayanan sosial khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan, serta pelayanan yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakatnya.

Upaya pertama mengarah pada penciptaan peluang bagi kelompok yang lemah secara ekonomi. Upaya yang kedua mengarah pada peningkatan kemampuan mereka dalam merebut dan memanfaatkan peluang yang telah diciptakan, untuk mewujudkan kedua hal ini diperlukan adanya intervensi pemerintah.

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih tenteram serta

lebih menjamin kelangsungan hidup di hari depan. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi, atau memanusiakan manusia⁸.

Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki sumber daya alam yang cukup baik, saat ini provinsi Riau mencanangkan program pemberantasan kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur (K2I). Program ini merupakan program yang pertama untuk wilayah yang ada di Indonesia. Titik fokus program ini adalah kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur. Pada tahun 2006 dilaksanakan program Bantuan Prasarana Infrastruktur Pedesaan (BPIP) yang merupakan langkah awal untuk mengayomi masyarakat terutama dipedesaan yang ada di provinsi Riau⁹.

Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan program kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur dari pemerintah provinsi Riau. Desa Bandar Sungai merupakan desa yang mayoritas penduduknya berpenghasilan dari berkebun, bertani, bertenak dan dilihat dari segi akademisnya rata-rata penduduk Desa Bandar Sungai masih kurang.

Pelaksanaan program pembangunan yang disediakan oleh pemerintah merupakan kesempatan yang diberikan seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengembangkan kemampuannya dan memanfaatkan program pembangunan tersebut.

⁸ Nourozzaman, dkk, *Etika pembangunan dalam pemikiran Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV.Raja wali 1986), Cet. Ke-1, h. 1

⁹ Riau Pos, 14 Juli 2008

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dengan judul: ***“PELAKSANAAN PROGRAM KEMISKINAN, KEBODOHAN DAN INFRASTRUKTUR (K2I) BANTUAN TERNAK KAMBING MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” (Studi Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Sia- Riau).***

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membatasi pembahasan ini kepada “Pelaksanaan Program Kemiskinan, Kebodohan Dan Infrastruktur (K2i) Bantuan Ternak Kambing Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak- Riau).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program (K2I) bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Program (K2I) Bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Program (K2I) Bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai

2. Kegunaan Penelitian

- a. Melengkapi tugas-tugas kelompok dan memenuhi salah satu dari persyaratan dalam mengajukan Skripsi.
- b. Menerangkan dan mengembangkan disiplin Ilmu yang di dapat diperguruan tinggi, sekaligus mengaplikasikannya.
- c. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang penelitian ilmiah, sekaligus sebagai sumbangan pikiran bagi instansi terkait.
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang peranan pelaksanaan Program (K2I) Bantuan ternak kambing.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi Penelitian ini Adalah Di Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Pada Masyarakat yang mendapatkan bantuan ternak kambing sehingga diharapkan dapat memberikan data-data yang lebih Valid tentang bantuan ternak kambing yang diterimanya dan lokasi penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pihak pelaksanaan program (K2I), dan masyarakat yang mendapatkan bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Sedangkan objek penelitian ini adalah pelaksanaan program kemiskinan, kebodohan dan infrasturuktur (K2I) bantuan ternak kambing menurut perspektif ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabah Auh Kabupaten Siak yang mendapat bantuan ternak kambing yang berjumlah 50 orang, yang terdiri dari 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Sedangkan sebagai sampelnya penulis mengambil sebanyak 50% atau 25 orang, masing-masing diambil 5 orang setiap kelompok dengan menggunakan metode Random Sampling. Yaitu, pengambilan sampel secara acak yang mana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan menyebarkan angket kepada masyarakat yang mendapat bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

b. Data Skunder

Data Skunder yaitu data yang berhubungan langsung dengan responden, dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang penulis teliti pada saat ini

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung gejala dan fenomena yang terjadi dilapangan.
- b. Wawancara yaitu bertanya langsung kepada Pihak pelaksanaan program (K2I) bantuan ternak kambing di desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak-Riau.
- c. Angket yaitu dengan cara membuat pertanyaan yang berhubungan dengan keperluan penelitian yang diajukan pada sumbernya.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Deskriptif yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada kemudian data-data tersebut dikelompokkan dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti.

7. Metode penulisan

- a. Metode Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus
- b. Metode Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya, penulisan ini disusun dalam 5 (lima) bab dan masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

- Bab I : Bab ini Mengemukakan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Bab ini berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian yang berisikan letak geografis dan demografis di desa Bandar sungai, agama dan pendidikan, mata pencarian dan adat istiadat
- Bab III : Bab ini berisikan Tinjauan teoritis tentang teori kemiskinan, pengentasan kebodohan, dan teori pembangunan.
- Bab IV : Dalam bab ini, ini menjelaskan tentang pelaksanaan program (K2I) bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai dan

tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Program (K2I)

Bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai.

Bab V : Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

DESA BANDAR SUNGAI KECAMATAN SABAK AUH

A. Letak Geografis dan Demografis

1. Geografis

Desa Bandar Sungai merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak yang memiliki luas daerah 2500 Ha. Daerah ini termasuk daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau. Orbitasi (jarak) antara desa dari pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 2,5 KM, jarak Desa dari Ibukota Kabupaten adalah 45 KM dan jarak Desa dari Ibukota Propinsi 187 KM.

Desa Bandar Sungai terdiri dari 10 rukun tentangga (RT), 5 Rukun Warga (RW), 2 Kepala Dusun dan 1 Kepala Desa. Bila ditinjau dari segi wilayah desa maka Desa Bandar Sungai mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sabak Pedada
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sabak Permai
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Sadar Jaya
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai Siak¹.

¹ Kepala desa (*laporan monografi desa Bandar sungai 30 agustus 2010*). Lam, 3

2. Demografis

Desa Bandar sungai dihuni oleh penduduk asli dan ada juga yang pendatang didesa ini. Berdasarkan sesus penduduk pada tahun 2009/2010 penduduk berjumlah 245 KK, 1070 jiwa yang terdiri dari laki-laki 515 jiwa dan permpuan 555 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel berikut ini:

Tabel II. 1
Klasifikasi Penduduk Desa Bandar Sungai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	515 orang	48,14 %
2	Perempuan	555 orang	51,86 %
Jumlah		1070 orang	100 %

(Sumber data: Kantor Kepala Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh)

B. Mata Pencarian

Suatu lingkungan tempat tinggal merupakan bagian integrasi dari kegiatan usaha penduduk setempat. Lingkungan seseorang dapat menunjang kelangsungan baik dari segi kepentingan sosial maupun kepentingan pribadi. Desa Bandar Sungai daerah yang strategis dan pada sisi lain kopisisi tanahnya gambut dan subur, maka mata pencarian masyarakat pun beraneka ragam, ada yang menjadi Pegawai sipil, Petani, Buru Tani, Pertukangan, wirasuwasta dan lain-lain. Namun yang paling dominan mata pencarian Desa Bandar Sungai adalah petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel II. 2
Klasifikasi Penduduk Desa Bandar Sungai Menurut Mata Pencarian

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	25 orang	2,33 %
2	Petani	340 orang	31,78 %
3	Buruh Tani	60 orang	5,60 %
4	Pertukangan	40 orang	3,74 %
5	Wirasuwasta	200 orang	18,70 %
6	Lain-lain	405 orang	37,85 %
Jumlah		1070 orang	100 %

(Sumber data: Kantor Kepala Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh)

Dilihat dari tabel di atas mayoritas penduduknya Desa Bandar Sungai bekerja sebagai pegawai negeri sebanyak 25 orang atau 2,33%, petani berjumlah sebanyak 340 orang atau 31,78%, sedangkan perkerja sebagai buruh tani sebanyak 60 orang atau 5,60%, sedangkan bekerja sebagai pertukangan sebanyak 40 orang atau 3,74%, sedangkan sebagai wirasuwata sebanyak 200 orang atau 18,70%, dan adapun yang selebihnya bekerja sebagai tidak tetap sedikit adalah dan urutan kedua yang paling sedikit adalah sebagai tidak tetap sebanyak 8 orang, atau 4,65 %.

C. Agama

Kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Allah haruslah semakin baik, sehingga kerukunan hidup beragama diantara pemeluk agama dapat terbina dengan baik. Di samping itu diantara pemeluk agama telah dapat terbina dan bekerja sama dalam pembangunan bangsa dan Negara. Di Desa

Bandar Sungai menganut agama Islam, protestan dan budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel II. 3
Klasifikasi Penduduk Desa Bandar Sungai Menurut Agama/ Kepercayaan

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1066 orang	99,62%
2	Protestan	2 orang	0,18%
3	Khatolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	3 orang	0,20%
6	Lain-lain	-	-
Jumlah		1070 orang	100 %

(Sumber data: Kantor Kepala Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Bandar Sungai yang beragama islam berjumlah sebanyak 1066 orang atau 99,62 %, yang beragama protestan berjumlah 2 orang atau 0,18 %, dan yang menganut agama budha berjumlah sebanyak 3 orang atau 0,20%.

Adapun sarana untuk menunjang peribadatan di Desa Bandar Sungai sudah memadai, jika dilihat sedikitnya jumlah jiwa yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya bermacam-macam rumah ibadah seperti Mesjid dan Mushalla.

Tabel II. 4
Klasifikasi Sarana Ibadah

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2 Mesjid
2	Mushalla	3 Mushalla
Jumlah		5 Mesjid dan Mushalla

(Sumber data: Kantor Kepala Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh)

D. Pemerintahan dan Pendidikan

1. Pemerintahan

Desa Bandar Sungai mempunyai seorang kepala desa, yaitu sebagai pemimpin desa. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa ia dibantu 4 orang kepala urusan (Kaur), 1 orang Sekdes (Sekertaris Desa), 4 orang LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), dan 5 orang BPD (Badan Pemeriksa Desa).

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu yang paling penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan perorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mudur suatu Negara ditentukan oleh pendidikannya. Mengenai pendidikan masyarakat Desa Bandar Sungai merasa sangat perlu karena sesuai dengan amanat UUD 45 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Ini berarti bahwa setiap warga berhak mendapatkan pengajaran yang baik

Masyarakat Desa Bandar Sungai juga telah ikut melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk melaksanakan program belajar mengajar untuk mencerdakan bangsa. Adapun lembaga pendidikan yang ada di Desa Bandar Sungai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 5
Klasifikasi Sarana Pendidikan Desa Bandar Sungai

No	Jenis pendidikan	Jumlah
1	SD	1 Sekolah
2	SLTP/MTs	1 Sekolah
3	SLTA/MA	1 Sekolah
Jumlah		3 Sekolah

(Sumber data: Kantor Kepala Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh)

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Desa Bandar Sungai masih Sangat relatif rendah hal ini terbukti sedikitnya jumlah penduduk yang sampai pada jenjang ini perguruan tinggi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 6
Klasifikasi Jenjang Pendidikan Di Desa Bandar Sungai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Tamat Sekolah	80 orang	7,48%
2	Belum Sekolah	85 orang	7,94%
3	Tamat SD	410 orang	38,31%
4	Tamat SLTP/MTs	240 orang	22,42%
5	Tamat SLTA/ MA	220 orang	20,56%
6	Tamat Perguruan Tinggi	35 orang	3,29%
Jumlah		1070 orang	100 %

(Sumber data: Kantor Kepala Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Bandar Sungai tergolong sangat rendah yaitu hanya 35 orang atau 3,29% saja yang tamat perguruan tinggi, sedangkan yang tamat SLTA hanya 220 orang atau 20,56%, yang tamat SLTP berjumlah sebanyak 240 orang atau 22,42%, yang tamatan SD berjumlah sebanyak

410 orang atau 38,315, yang belum sekolah berjumlah sebanyak 85 orang atau 7,94%, dan yang tidak tamat sekolah berjumlah sebanyak 80 orang atau 7,48%.

E. Adat Istiadat

Adat istiadat tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang secara turun temurun dan menjadi tingkah laku sehari-hari dalam kehidupan serta pergaulan. Asas dari adat istiadat memelihara keseimbangan dalam hubungan kerukunan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Peranan adat istiadat dari dahulu samapai sekarang masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tentunya masyarakat masih tetap mentaati peraturan-peraturan, perundang-undangan dan tetap menjalankan syari'at agama Islam. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta syari'at Islam, adat istiadat masih tetap sangat diperlukan.

Pada dasarnya adat istiadat yang terdapat di Desa Bandar sungai tidak jauh berbeda dengan adat istiadat pada daerah lainnya. Adapun adat istiadat itu antara lain².

1. Pernikahan

Sebelum melaksanakan pernikahan upacara pernikahan, terlebih dahulu masyarakat harus melalui langkah-langkah awal, seperti merisik yaitu berkumpul kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Hal ini dilakukan dalam rangka proses

² Noto (kepala desa Bandar sungai), 8 juli 2011

perkenalan, baik untuk kedua calon maupun antara keluarga yang satu dengan lainnya. Hal ini dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan dan merupakan salah satu cara mendapatkan kesempatan antara kedua belah pihak terhadap proses pelamaran dan 'alimatul ursnya.

2. Khatam Qur'an

Upacara khatam Al-Qur'an ini biasanya dilakukan dalam acara khitanan atau pun pernikahan. Hal ini bertujuan bertujuan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa membaca Al-qur'an.

3. Kenduri

Kenduri biasanya dilakukan dengan cara pembacaan surat yasin, tahlil, tahmid dan tasbih serta do'a bersama. hal ini dilakukan pada upacara kenduri karena ada kematian (Ta'ziah), juga pada upacara hajatan baik itu syukuran, nazar maupun aqikah. Dengan tujuan diadakan ini supaya segala do'a dan permohonan dapat dikabulkan oleh Allah SWT.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Gambaran Umum tentang Program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I)

Berbagai cara dan strategi telah dilakukan oleh Provinsi Riau dalam melaksanakan pembangunan, salah satunya adalah dengan membentuk kebijakan prioritas yang salah satunya dikenal dengan program pengentasan Kebodohan, Kemiskinan dan Infrastruktur atau yang lebih dikenal dengan program K2I.

Program K2I adalah program bantuan dari pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat berekonomi lemah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang pada gilirannya diharapkan dapat menanggulangi kebodohan yang ditunjang dengan pembangunan infrastruktur.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan dilaksanakan dengan pendekatan utama yang dilakukan melalui penguatan asset ekonomi baik melalui perlindungan/jaminan sosial ekonomi masyarakat, penguatan asset produktif serta kredit usaha rakyat yang diperlukan dengan perluasan net working pasar, penguasaan teknologi dan pemberdayaan koperasi serta UKM dalam menunjang pengembangan Agro Bisnis dan Agro Industri¹.

¹ RPJMD Provinsi Riau, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau, (Riau: BAPPEDA Provinsi Riau, 2009-2013), h. VI-2

Permasalahan dibidang pengentasan kemiskinan, antara lain:

1. Masih banyaknya penyebaran kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Riau (terutama di daerah pesisir, daerah terpencil, dan pulau-pulau kecil);
2. Ketidak mampuan dan keterbatasan masyarakat miskin mendapatkan akses modal, produksi dan pemasaran;
3. Kegagalan program-program pengentasan kemiskinan (IDT, P3KT, PPK, JPS, Sektor, dll), akibat terlalu berorientasi proyek dan kentalnya mental “birokrasi”;
4. Signifikannya angka kemiskinan ekonomi dan kemiskinan absolut di masyarakat;
5. Lemahnya jiwa kewirausahaan UKM dan Koperasi, sehingga sulit untuk berkembang membantu masyarakat miskin;
6. Lemahnya daya saing dalam memanfaatkan peluang usaha, mengisi peluang kerja dan memasarkan hasil produksi;
7. Masih tingginya dominasi Pemerintah dalam mengatur dan menentukan aktivitas masyarakat miskin dan perlunya waktu untuk proses perubahan menjadi mental kemandirian melalui pemberdayaan².

Walaupun demikian diperlukan adanya arah kebijakan dalam bidang pengententasan kemiskinan ini. Adapun arah kebijakan pembangunan bidang pengentasan kemiskinan antara lain:

1. Memberikan dan menumbuhkan daya dorong kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemihakan kepada

² RPJMD Provinsi Riau, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau, (Riau: BAPPEDA Provinsi Riau, 2006), h. 17

pemberdayaan masyarakat, penyelarasan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat dengan pengembangan perencanaan pembangunan yang komprehensif, partisipatif, demokratis, aspiratif dan transparan.

2. Melakukan restrukturisasi dan redistribusi kepemilikan asset produktif kepada petani dan masyarakat dengan menggunakan standar skala ekonomi keluarga petani sejahtera (± 4 ha/KK).
3. Melakukan optimalisasi peran dan fungsi seluruh perusahaan agribisnis dan *forestry* (dengan Peraturan Daerah) sebagai investor di Riau untuk melakukan re-investasi melalui kemitraan pola perusahaan patungan bersama pemerintah dan petani pedesaan.
4. Mengembangkan usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha mikro lainnya dengan cara peningkatan dan pengembangan keterkaitan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Kemitraan ini dikembangkan baik sesama usaha kecil maupun dengan usaha-usaha besar dan kuat yang telah memiliki akses pasar global melalui pemberian pinjaman modal dengan syarat mudah dan suku bunga rendah/terjangkau.
5. Mengembangkan bidang-bidang yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan bidang lain yaitu bidang industri, pertanian dalam artian luas, bidang transportasi, perdagangan, pariwisata serta bidang kelautan sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah.
6. Meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur terutama perhubungan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas orang dan

barang, distribusi kebutuhan bahan pokok, hasil produksi dan faktor-faktor produksi, serta memacu pengembangan kawasan potensial, kawasan sentra produksi, kawasan agropolitan, kawasan industri dan kawasan sentra perdagangan yang selanjutnya dapat dijadikan kutub pertumbuhan ekonomi daerah yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya secara sinergi.

7. Mendorong upaya peningkatan nilai tambah (*value added*) produk pertanian melalui pengembangan sistem agribisnis dan agroindustri yang menekankan pada upaya pengembangan berbagai industri turunan dari produk pertanian tersebut.
8. Meningkatkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi berbagai potensi sumber-sumber keuangan daerah serta memperjuangkan keadilan perimbangan keuangan sebagaimana diatur oleh Undang-undang tentang keuangan negara dan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah dirubah.
9. Mengembangkan kebijakan ekonomi makro dan mikro secara terkoordinasi dan berkelanjutan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna memacu perkembangan perekonomian daerah.
10. Memberdayakan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif dan memberdayakan masyarakat miskin serta mendorong berkembangnya lembaga-lembaga

keuangan mikro dalam rangka mendekatkan masyarakat terhadap akses permodalan³.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dengan perhatian utama pada pelayanan dasar pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dapat mendorong Link and Match antara dunia pendidikan dengan pasar kerja, disamping meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan melalui perbaikan layanan, peningkatan penyediaan sarana/prasarana kesehatan serta peningkatan penyediaan dan peningkatan kompetensi tenaga medis di Rumah Sakit, Puskesmas dan Pos Pelayanan Kesehatan di pedesaan dll. Sedangkan dalam bidang ketenagakerjaan lebih ditekankan pada upaya pendekatan ketrampilan kerja dan mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta penguatan Iman dan Taqwa (IMTAQ) melalui pendekatan keagamaan baik dalam bentuk jenjang pendidikan formal maupun melalui informal (dakwah dan pengajian).

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), diantaranya:

1. Belum tuntasnya pengentasan Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun dan tingginya angka buta huruf pada wilayah terpencil dan marginal;
2. Terbatasnya lembaga pendidikan yang bermutu dan belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM);

³ *Ibid*, h. 19-21

3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar kualitas.
4. Tingginya angka pengangguran sebagai akibat dari tidak terampilnya usia produktif, besarnya jumlah migrasi masuk yang bermasalah, terjadinya PHK dan dampak negatif Riau dijadikan daerah transit TKI ilegal
5. Pemahaman, pengamalan, dan peranan individu terhadap agama yang belum sepenuhnya kondusif dalam berbagai aspek kehidupan sehingga kurang mendorong peningkatan kualitas hidup;
6. Tingginya laju pertumbuhan penduduk terutama migrasi bermasalah dan penyebaran penduduk yang tidak seimbang;
7. Terbatasnya pelayanan kesehatan masyarakat;
8. Tingginya kasus wabah penyakit menular dan banyaknya daerah-daerah endemis yang berpotensi menjadi daerah penyakit menular;
9. Lemahnya sistem manajemen dan terbatasnya jumlah SDM Aparatur yang profesional;
10. Terjadinya perubahan dan pergeseran sistem tata nilai sosial budaya dalam masyarakat pada hinerland dan pedesaan yang berkembang⁴.

Disamping itu juga diperlukan penyediaan infrastruktur dalam upaya mendukung peningkatan investasi, pemerataan pembangunan dan pelayanan kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan, pedesaan, pedalaman, wilayah pesisir, daerah kepulauan, perbatasan, daerah aliran sungai serta penguatan Kawasan Andalan yaitu pusat kegiatan nasional (PKN) pusat kegiatan wilayah

⁴ *Ibid*, h. 29

(PKW) dan pusat kegiatan lokal (Lokal) dalam bentuk infrastruktur jalan/jembatan, air bersih, listrik, perhubungan darat, laut dan udara, perumahan dan lain-lain.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur antara lain:

1. Terbatasnya kemampuan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur terutama pada kawasan hinterland, pedesaan tradisional, dan daerah terisolir;
2. Belum tercapainya kondisi keseimbangan pemenuhan kebutuhan dan kemampuan peyediaan (*equilibrium supply and demand*) sebagai sasaran utama pembangunan infrastruktur;
3. Belum optimalnya fungsi pelayanan infrastruktur sebagai *derived demand* bagi pertumbuhan fungsi dan bidang ekonomi dan sosial;
4. Penanganan infrastruktur cenderung bersifat divergen, sehingga terjadi perbedaan fundamental (urban dan rural sprawl) dalam implementasi pemanfaatan ruang dan pola pengembangan wilayah;
5. Belum adanya dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur yang terpadu, holistik dan tidak adanya sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Pembangunan infrastruktur tidak mengacu kepada database yang valid, sehingga sering terjadi inefisiensi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
7. Masih banyaknya daerah terisolir dan belum tersentuh pembangunan;

8. Tidak optimalnya evaluasi pasca pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
9. Adanya stagnasi dalam penanganan infrastruktur akibat mekanisme penyusunan anggaran, sehingga membawa dampak terhadap investasi (*high cost economy*);
10. Belum digunakannya indikator *influence area* dan *multiplier economy income* secara kuantitatif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur⁵.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka diambil arah dan kebijakan dengan Master Plan yang mengacu kepada Renstra dengan memfokuskan kepada strategi dan prioritas tahunan yang mengacu kepada pola investasi dan pola konvensional. Pola investasi memfokuskan kepada pembangunan Kereta Api, Highway, Pelabuhan dan Kawasan Industri, Air Bersih, Power Plant (Energi Listrik), Water Front City, pabrik semen, dan relokasi bandara.

B. Konsep Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan rendah)⁶. Selain miskin kata faqir juga sering digunakan sebagai padanan atau majemuk dari kata miskin itu sendiri. Kata ini berarti sebagai orang yang sangat berkekurangan atau sangat miskin⁷. Dalam bahasa aslinya (Arab) kata

⁵ *Ibid*, h. 37-38

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 312

⁷ *Ibid*, h. 749

miskin terambil dari kata sakana yang berarti diam atau tenang, sedangkan faqir berasal dari faqr yang pada mulanya berarti tulang punggung. Faqr adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya⁸.

Dengan demikian, definisi umum tentang kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas⁹.

Menurut perspektif ekonomi barat, kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling minimal atau elementera (mendasar), dalam pengertian ini, seseorang dianggap miskin ketika dirinya tidak mampu memenuhi segenap kebutuhan dasar yang sangat penting untuk bertahan hidup serta memungkinkannya mampu bekerja dan melakukan kegiatan produktif.¹⁰

Menurut sudut pandang ekonomika islam, problematika kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai tingkat penghidupan tertentu yang terbilang layak berdasarkan situasi dan kondisi,

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Jakarta: Mizan, 1996, h, 449

⁹ Ambar Teguh, Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Jakarta: Gava Medie 2004, h, 17

¹⁰ Abu Akbar Achmad, *Pustaka Pengetahuan Al-Qur'an*, PT. Rahel Publika; Jakarta, 2007, Cet. Ke-1, h.42

serta pekerjaan dan tanggung jawab individu, dalam hal ini ahli fikih islam klasik menyebut istilah tersebut dengan had al-kafiyah yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan yang mulia dan adakalanya menyebut dengan istilah had al-gani yang bermakna bahwa miskin bilamana tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam kadar memungkinkannya hidup kecukupan dan kaya raya dibanding orang lain.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut maka kemiskinan menurut pandangan islam, baik individu maupun Negara adalah kondisi hidup terpuruk, yang menyebabkan individu atau Negara tertinggal atau jauh berada di bawah tingkat kehidupan rata-rata individu masyarakat dalam skala nasional (yang bersumber dari kesenjangan individu masyarakat), atau dari Negara maju dalam skala internasional (berasal dari kesenjangan atau ketimpangan ekonomi yang semakin lebar antara negar-negara berkembang dan Negara maju).¹²

Menurut Al-Ghazali menyatakan bahwa orang miskin adalah mereka yang memperoleh penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹³ Golongan miskin adalah mereka yang memiliki harta ataupun untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya namun tidak cukup untuk memenuhi dasar berupa pangan, sandang dan papan istilah miskin bias juga berarai berarti mereka yang tidak mengemis, tidak mau memohon

¹¹ *Ibid*, h. 43

¹² *Ibid*, h. 44

¹³ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Konstruksi Sosial*, (Bandung: angkasa bandung, 2008), Cet. Ke-1, h. 154

balas kasian orang lain meskipun kondisi mereka kekurangan.¹⁴

2. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.¹⁵ Komunitas yang termasuk ke dalam kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum. Adapun komunitas yang termasuk kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum yang secara relatif berada di bawah rata-rata pendapatan masyarakat di sekitarnya.

Dalam pandangan lain, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan natural, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.¹⁶ Kemiskinan natural disebut juga dengan kemiskinan turun temurun. Kemiskinan ini disebabkan keterbatasan secara alamiah yang dialami suatu komunitas, sehingga sulit untuk melakukan perubahan. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya. Artinya, kemiskinan itu terjadi oleh adanya nilai-nilai budaya yang membuat masyarakat sulit mengembangkan dirinya dan terjebak ke dalam suasana kemiskinan turun temurun. Misalnya, dalam budaya Jawa “*mangan ora mangan ngumpul*” telah mengkondisikan suatu masyarakat pada lingkaran kemiskinan. Begitu juga dalam budaya Melayu. Ungkapan “makan-makan angin” sering mempengaruhi perilaku sosial masyarakat

¹⁴ Mamluatul Magfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 14

¹⁵ *Op, cit*, h. 17

¹⁶ *Ibid*, h, 29.

untuk terbiasa membuang-buang waktu dan hidup secara tidak efisien dan tidak produktif. Sehingga, sadar atau tidak disadari mereka pun terjebak dengan kemiskinan.

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat miskin. Misalnya, kebijakan ekonomi yang tidak adil, penguasaan faktor produksi yang tidak merata, korupsi, kolusi dan nepotisme, kebijakan ekonomi global dan lain sebagainya.

3. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan ini telah banyak ditulis oleh para ahli. Sayogyo, misalnya, mengkonversikan kemiskinan dengan nilai kilogram beras yang dikonsumsi dalam satu tahun. Menurutnya indikator kemiskinan adalah setara dengan 240 kg/orang/tahun. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin apabila dalam satu tahun tidak mengkonsumsi beras sesuai dengan yang disebutkan di atas.

Biro Pusat Statistik mengkonversikan kemiskinan dengan kebutuhan kalori, yaitu 2100 kalori perkapita perhari, sementara, Bank Dunia menggunakan ukuran 2200 kalori per orang per hari. Indikator ini juga memiliki kelemahan, yaitu *pertama*: kalori yang sama dapat diperoleh melalui makanan yang berharga mahal atau berharga murah. Misalnya beras dan gandum mempunyai harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan umbi-umbian. Akibat perbedaan harga sumber kalori tersebut sulit mengukur tingkat kemiskinan seseorang dari nilai rupiah yang di

keluarkan. *kedua*: kebutuhan dasar untuk hidup minimal bukan hanya kalori, melainkan masih ada unsur-unsur lain, seperti sandang papan, pendidikan dan kesehatan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak tahun 1994 juga mengembangkan beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan mempergunakan indikator ekonomi, sosial, kesehatan, dan gizi. Hasil kajian terhadap indikator-indikator tersebut memetakan kesejahteraan keluarga dalam beberapa tingkatan sebagai berikut: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, dan Keluarga Sejahtera III Plus. Keluarga yang masuk ke dalam kategori miskin adalah keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera¹⁷.

Indikator-indikator di atas, belum memetakan kemiskinan yang dihasilkan oleh aspek kultural dan struktural sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian Indikator-indikator tersebut perlu diintegrasikan dan disempurnakan dengan menambahkan aspek kemudahan akses ke arah kepentingan publik yang cukup beragam seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pasar, pekerjaan dan lain-lain.

4. Pengentasan kemiskinan

Menurut pandangan kapitalis pengentasan kemiskinan melalui Negara harus memberikan kebebasan mutlak dan seluas-luasnya bagi semua orang untuk melakukan kegiatan produksi, membangun, bersaing, serta menjadi kaya raya tanpa dibatasi peraturan atau persyaratan apapun. Sementara

¹⁷ *Op. Cit.* h. 35.

orang yang belum beruntung (miskin dan kalah bersaing) harus puas dengan keadaannya.

Menurut pandangan sosialis, kemiskinan dapat diminimalisir dengan mengubah cara, hubungan produksi serta pola distribusi kekayaan sampai ke akar-akarnya, seraya melarang kepemilikan pribadi dan membunuh orang kaya yang hidup mewah.

Menurut pandangan ekonomi islam, islam menyatakan bahwa persoalan ekonomi tidak berkenaan dengan banyak sedikitnya penghasilan atau bagusnya hasil produksi, melainkan sesuai dengan ketepatan (Nas) Al-Qur'an al-Karim, untuk itu jalan keluar yang diberikan oleh Islam adalah membebaskan kemiskinan itu kepada setiap individu yang mampu memenuhinya, termasuk menanggung orang yang tidak mampu dengan memberikan pekerjaan. Jika tidak memiliki kemampuan (sakit, sudah tua atau anggota tubuh tidak berfungsi normal) maka negaralah yang menanggungnya dengan memberi harta dari hasil zakat melalui lembaga perekonomian yang dibangun oleh Islam sejak empat belas abad silam dengan tujuan membebaskan manusia dari belitan kemiskinan dan kekurangan serta memurnikan ibadah kepada Allah.

C. Kebodohan

1. Definisi Kebodohan

Secara etimologis, kebodohan berasal dari kata bodoh yang mendapat awalan *ke* dan akhiran *an*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bodoh diartikan sebagai sifat tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, tidak

memiliki pengetahuan, pendidikan dan pengalaman. Kata ini, dalam bahasa Inggris identik dengan kata stupid.

Dalam bahasa Arab, kata bodoh sepadan dengan kata al-jahl dan al-safih yang berarti 'adam al-ilmi bi al-syai' (tidak ada pengetahuan tentang sesuatu), sehingga orang yang tidak berpengetahuan disebut jahil. Sedangkan dalam perspektif agama (Islam) jahil dapat diklasifikasikan menjadi jahil murakkab dan jahil basith. Jahil murakkab adalah jahil yang terstruktur atau kebodohan di mana seseorang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Sedangkan jahil basith adalah kebodohan di mana seseorang memiliki pengetahuan tentang sesuatu, tetapi tidak sampai pada tingkat yang memadai.

Bertitik tolak dari pengertian etimologis di atas, dapat dipahami bahwa masalah kebodohan tidak hanya bersifat mikro (bersifat pendidikan formal dan non formal) tetapi lebih bersifat makro (mencakup wawasan, etos, skill dan peradaban). Hal ini sejalan dengan sebutan jahiliyah, sebutan yang dahulu pada masa pra Islam ditujukan kepada orang-orang yang bukan tidak memiliki pengetahuan dalam pengertian mikro seperti disebut di atas, tetapi lebih berorientasi pada pengertian makro terutama yang berhubungan dengan wawasan, etos, skill dan peradaban.

2. Urgensi Pengentasan Kebodohan

Mengingat kebodohan adalah kendala paling utama dalam meraih kesuksesan hidup di dunia maupun akhirat, maka usaha untuk mengentaskannya harus dijadikan sebagai prioritas dan upaya yang paling

urgen. Bicara tentang pengentasan kebodohan, adalah bicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang untuk negara-negara berkembang, terutama Indonesia, merupakan kelemahan mendasar yang perlu segera dicarikan solusinya.

Pengalaman selama krisis ekonomi menunjukkan bahwa negara-negara seperti Korea, Jepang, Thailand, Singapura dan Malaysia sama-sama terkena krisis dengan Indonesia. Namun, akibat perbedaan kualitas SDMnya, Indonesia mengalami krisis yang lebih parah dibanding negara-negara lainnya itu. Hal ini sangat dipengaruhi oleh aktor SDM mereka yang pukl rata lebih tinggi dari Indonesia (*Human Development indeks*). Di sini jelas sekali bahwa langsung atau tidak langsung, kualitas SDM mempunyai peran paling utama dan sangat menentukan dalam pembangunan ekonomi suatu negeri.

D. Infrastruktur (Pembangunan)

1. Konsep Infrastruktur (Pembangunan)

Infrastruktur atau yang lebih dikenal dengan pembangunan dalam konsep islam adalah kempuan untuk mewujudkan cita-cita islam melalui pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehudupan umat termasuk juga mengurus Negara. Pembangunan dalam pengertian islam berarti ungkapan demikian budaya yang ditandai oleh keinginan umat islam untuk tetap bertahan dalam keadaan yang islami.¹⁸ Dari berbagai literatur dapat

¹⁸ Muhammad Al-Borey, *Islam landasan alternative adimistrasi pembangunan*, Jakarta, Rajawali, 1986, h, 23, cet, 1

dipahami bahwa konsep pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan pem dan berakhiran an. Pembangunan sekurang-kurangnya mengandung empat arti, yaitu:

- a. Pembangunan sebagai kata tunggal memiliki makna majemuk,
- b. Pembangunan sebagai kata sifat pembangunan adalah kondisi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya,
- c. Pembangunan sebagai kata benda pembangunan berkaitan dengan output atau hasil dari suatu kegiatan,
- d. Pembangunan sebagai kata kerja diartikan sebagai proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan terus menerus.

Konsep pembangunan telah menjadi bahasa dunia. Hasrat bangsa-bangsa di dunia untuk mengejar bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan caranya masing-masing, melahirkan berbagai pengertian yang berkaitan dengan konsep pembangunan (*development*). Dari pengertian bangun dan pembangunan sebagaimana yang dikemukakan, dapat dirumuskan konsep pembangunan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk mengubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik lagi.

Dari berbagai konsep pembangunan yang dikemukakan para ahli memberikan pengertian bahwa pembangunan adalah sebagai suatu proses yang dilakukan secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk mengubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, menyangkut semua aspek kehidupan, fisik-nonfisik, material-spiritual, meliputi bidang

ideologi, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya dan ketahanan masyarakat (nasional) suatu bangsa.

2. Konsep Infrastruktur (Pembangunan) Berdasarkan Al-Qur'an

Konsep pembangunan berdasarkan Al-Qur'an yaitu bersifat menyeluruh, menyentuh ke dalam jati diri manusia, dalam rangka membangun manusia seutuhnya, seimbang antar materil dan spiritual. Dengan prinsipnya sebagai berikut:

- a. Tauhid, dalam arti percaya akan kemahaesaan tuhan serta segala sesuatu serba menyatu antara jiwa dan raga, materil-spirituil, dunia-akhirat.
- b. Rububiyah, dalam arti bahwa Allah memelihara manusia melalui petunjuk, rahmat dan rezkinya untuk disyukuri. Syukur dalam arti memanfaatkan alam sesuai dengan tujuan penciptaanya yaitu untuk kemakmuran manusia.
- c. Khilafah, dalam arti bahwa manusia adalah wakil tuhan di muka bumi yang bertanggung jawab untuk memelihara alam dengan sebaik-baiknya
- d. Tazkiyah, dalam arti bahwa hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam harus diliputi dengan kesucian serta pemeliharaan nilai-nilai agama, akal, jiwa, harta dan kehormatan manusia sehingga setiap tindakan yang menodai kelima hal tersebut tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an.¹⁹

¹⁹ Azyumardi Azra, *op, cit.* h. 340

3. Asas-asas Infrastruktur (Pembangunan Nasional)

Adapun asas-asas pembangunan nasional yaitu:

- a. Asas manfaat ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga Negara.
- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, ialah bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- c. Asas demokrasi ialah, demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
- d. Asas adil merata ialah, bahwa hasil materiil dan sprituil yang mencapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa dan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma baktinya yang berkitan pada bangsa dan Negara.
- e. Asas kehidupan dalam keseimbangan ialah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yaitu antara kepentingan duniawi dan akhirat, antara kepentingan materiil dan sprituil, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara

kepentingan kehidupan darat, laut dan udara, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

- f. Asas kesadaran hukum ialah bahwa tiap warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
- g. Asas kepercayaan pada diri sendiri, ialah bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersandikan kepada kepribadian bangsa²⁰.

4. Unsur-Unsur Sistem Dalam Mewujudkan Pembangunan

Terdapat sejumlah unsur yang menjadi syarat umum bagi sebuah konsep pembangunan adalah keserasian dengan lingkungan dimana hal itu diterapkan, mampu membangkitkan dan mengendalikan semangat masyarakat untuk membangun, bersifat fleksible (mampu menyesuaikan diri) sehingga dapat beradaptasi pada kondisi yang tidak stabil²¹.

Sedangkan menurut pandangan Islam sistem pembangunan kehidupan adalah sebuah hakikat yang terencana dan merupakan implementasi (perwujudan) dari kehendak Allah, karena manusia merupakan bagian dari makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, dimana setiap individu memiliki derajat yang sama, hal tersebut melalui poin yang agar terbentuknya pembangunan itu sendiri, diantaranya: Deklarasi kesetiaan kepada Allah SWT serta menolak ideology yang menantang, membangun manusia yang

²⁰ Ali Chasan Umar, *Al-Qur'an dan Pembangunan Nasional*, CV. Bahagian Batang; Semarang, 1992, cet, ke-1, h. 138

²¹ Abu Akbar Achmad, *op, cit.* h. 100

Islami, menciptakan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat, menghidupkan aturan-aturan sumber daya Islam, mengarahkan produksi demi memenuhi standar minimum kehidupan manusia yang layak.

BAB IV

**PELAKSANAAN PROGRAM KEMISKINAN,
KEBODOHAN DAN INFRASTRUKTUR (K2I) BANTUAN
TERNAK KAMBING MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

A. Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Kambing K2I di Desa Bandar Sungai

Program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur atau yang lebih dikenal dengan K2I adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, memberantas kebodohan dan meningkatkan infrastruktur melalui sektor pertanian dan perkebunan.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui usaha peternakan, Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana pembangunan untuk kegiatan pengembangan ternak ruminansia khususnya ternak kambing kacang. Pengembangan ternak kambing kacang diarahkan pada usaha breeding sehingga kambing dapat berkembang dan dapat menambah jumlah populasi di suatu daerah. Pola pemeliharaan kambing kacang adalah secara individu dimana masing-masing peternak memelihara 10 ekor. Skala pemeliharaan ini diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan peternak penerima bantuan kambing. Dengan demikian diharapkan peternak benar-benar dapat

menjadikan usaha peternakan sebagai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga¹.

Dalam melaksanakan kegiatan program K2I bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai, ada persyaratan yang harus diperhatikan untuk mendapatkan bantuan tersebut, diantaranya adalah:

1. Lokasi

Lokasi merupakan faktor penting dalam usaha peternakan terutama untuk memudahkan pembinaan, pelayanan, kesehatan, dan pemasarannya. Untuk memudahkan dan efisiensi usaha peternak, maka lokasi dipilih sebagai tempat usaha perlu dipertimbangkan².

2. Persyaratan peternak

Sasaran penerima bantuan ternak kambing adalah masyarakat miskin. Guna memperoleh manfaat secara luas, sasaran penerima bantuan ternak sebagai asas pemerataan memperhatikan aspek teknis peternakan, dengan persyaratan melapirkan KTP, KK dan masyarakat miskin yang dapat dipercaya serta terdaftar sebagai anggota kelompok tani ternak,

3. Hak peternak

Adapun hak peternak antara lain:

- Menerima bantuan ternak kambing

¹ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, 2010, Petunjuk Pelaksanaan Juklah “Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kambing Kacang Tahun 2010”, Pekanbaru, h. 1

² *Ibid*, h. 3

- Mendapatkan bimbingan dan pembinaan teknis serta bantuan lainnya yang diberikan pemerintah daerah.
- Menikmati keuntungan hasil usaha dalam bentuk natura maupun innatura³.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau dalam mensosialisasikan program K2I tersebut baik melalui aparat pemerintah di daerah, media cetak maupun media elektronik karena program tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur di Provinsi Riau pada umumnya dan kabupataen Siak Khususnya. Program K2I pada umumnya diperuntukkan untuk masyarakat berekonomi menengah kebawah. Hal ini bertujuan dengan adanya bantuan tersebut permasalahan pada masyarakat menengah kebawah yakni kemiskinan dan kebodohan dapat diminimalisir. Untuk mengetahui kategori masyarakat yang mendapatkan bantuan ternak kambing K2I di Desa Bandar Sungai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 1
Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Ternak Kambing K2I Di Desa Bandar Sungai

No	Alternatif Jawaban	Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Masyarakat Mampu	0	0
2	Masyarakat Kurang Mampu	18	72
3	Masyarakat Miskin	7	28
Jumlah		25	100

³ *Ibid*, h. 6

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kategori masyarakat yang mendapatkan program bantuan ternak kambing K2I di desa Bandar Sungai yakni sebanyak 18 orang atau 72% mengatakan masyarakat kurang mampu. Dan sisanya sebanyak 7 orang atau 28% mengatakan masyarakat miskin. Perbedaan tanggapan responden ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang mendapatkan bantuan ternak kambing adalah masyarakat kurang mampu dan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan bantuan ternak harus mengajukan proposal yang anggotanya adalah berkelompok sehingga tidak menutup kemungkinan didalam kelompok tersebut juga terdapat masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan ternak kambing K2I tersebut. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang perternak dan setiap kelompok mendapatkan bantuan 100 ekor kambing untuk 10 orang perternak yang kemudian setiap peternak diberikan hak untuk dapat memanfaatkan bantuan tersebut sebaik mungkin.

Dengan adanya program K2I tentu ada pembinaan atau penyuluhan yang diadakan oleh pihak pelaksana. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pembinaan atau penyuluhan bapak/ibu akan program bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 2
Tanggapan Responden tentang pembinaan
Program Bantuan Ternak Kambing K2I di Desa Bandar Sungai

No	Alternatif Jawaban	Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Ada	0	0
2	Tidak Ada	25	100
Jumlah		25	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan responden tentang pelaksanaan program bantuan ternak kambing K2I di Desa Badar Sungai sebanyak 25 orang responden atau sebesar 100% mengatakan Tidak ada pembinaan atau pemantauan.

Masyarakat berharap agar pembinaan program K2I hendaknya terus berjalan dengan berbagai perbaikan-perbaikan di setiap aspek, sehingga mampu meminimalisir tingkat-tingkat kesalahan yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah. Untuk mengetahui kewajiban responden dalam memanfaatkan program bantuan ternak kambing K2I di desa Bandar Sungai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 3
Tanggapan Responden dalam Memanfaatkan Program K2I
Bantuan Ternak Kambing di Desa Bandar Sungai

No	Alternatif Jawaban	Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Memelihara bantuan yang diberikan	23	92
2	Memotong bantuan ternak yang diberikan	0	0
3	Menjual bantuan yang diberikan	2	8
Jumlah		25	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang bagaimana memanfaatkan bantuan ternak kambing K2I di Desa Bandar Sungai adalah sebanyak 23 orang atau sebesar 92% menyatakan memelihara bantuan yang diberikan, Sedangkan sebanyak 2 orang atau sebesar 8% menyatakan menjual bantuan yang diberikan untuk kebutuhan. Jadi kebanyakan responden memanfaatkan program K2I bantuan ternak kambing di desa Bandar Sungai adalah dengan memelihara bantuan yang diberikan,

walaupun ada juga masyarakat yang menggunakan bantuan ternak tersebut dijual untuk kebutuhan dikarenakan aspek hasil nilai ekonominya yang cukup lama. Kebutuhan yang harus dipenuhi segera dan waktu yang tadinya bisa digunakan untuk mendapatkan pendapatan, namun terfokus kepada pemeliharaan ternak. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat yang mendapatkan bantuan memilih untuk menjual ternak guna memenuhi kebutuhan hidup⁴. Hal ini ditandai apabila terjadi kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan kematian ternak akan dikenakan sanksi berupa tidak mendapatkan bantuan lagi.⁵

Bantuan dari pemerintah tersebut, sangat diharapkan oleh masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf ekonominya kearah yang lebih baik. Untuk itupun pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi persoalan ekonomi masyarakat yang salah satunya adalah dengan melaksanakan program K2I. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang program K2I bantuan ternak kambing tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 4
Tanggapan Responden Tentang Program Bantuan Ternak Kambing K2I
Di Desa Bandar Sungai

No	Alternatif Jawaban	Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	25	100
2	Kurang Baik	0	0
3	Cukup Baik	0	0
Jumlah		25	100

⁴ Supandi (Warga yang mendapat bantuan), (Pengunaan bantuan ternak), wawancara, 20 Agustus 2011

⁵ Toto (kepala desa) ,wawancara 25 agustus 2011

Responden sangat antusias akan program bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah program bantuan ternak kambing K2I di desa Bandar Sungai yang dibuktikan oleh sebanyak 25 orang atau 100% responden mengatakan bahwa program tersebut sangat baik. Hal ini menunjukkan betapa berharapnya masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah guna memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang perekonomian mereka sebelum dan sesudah adanya bantuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 5
Tanggapan Responden tentang Perekonomian Sebelum Adanya Program K2I Bantuan Ternak Kambing di Desa Bandar Sungai

No	Alternatif Jawaban	Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Baik	9	36
2	Cukup Baik	11	44
3	Kurang Baik	5	20
JUMLAH		25	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang perekonomian mereka sebelum adanya program bantuan ternak kambing K2I di Desa Bandar Sungai sebanyak 9 orang atau sebesar 36% mengatakan baik. Kemudian sebanyak 11 orang atau sebesar 44% mengatakan cukup baik dan sisanya sebanyak 5 orang atau sebesar 20% mengatakan kurang baik. Jadi Tanggapan Responden tentang perekonomian sebelum adanya program K2I bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai yaitu biasa saja.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang perekonomian mereka sesudah adanya program bantuan ternak kambing di desa Bandar Sungai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 6
Tanggapan Responden Tentang Perekonomian Sesudah Adanya Program Bantuan Ternak Kambing K2I di Desa Bandar Sungai

No	Alternatif Jawaban	Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Semangkin Baik	0	0
2	Kurang Baik	9	36
3	Biasa Saja	16	64
Jumlah		25	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang perekonomian mereka sesudah adanya program bantuan ternak kambing K2I di Desa Bandar Sungai sebanyak 9 orang atau sebesar 36 % menyatakan kurang baik sesudah adanya bantuan. Sedangkan sisanya sebanyak 16 orang atau sebesar 64 % menyatakan biasa saja.

Jika dilihat dari segi ekonomi, program tersebut sangat baik apabila dikembangkan dan dijalankan secara maksimal. Maksimal dalam arti kata bahwa dalam hal memberikan bantuan tersebut hendaknya harus diikuti dengan pengawasan, pengontrolan, penyulusan dan biaya-biaya penunjang seperti biaya pengobatan dan upah perawatan semasa bantuan tersebut belum menghasilkan.

Jika program bantuan ternak tersebut tidak dikembangkan dengan baik akan beresiko yang berakibat menurunnya kondisi ekonomi masyarakat setelah mendapat bantuan disebabkan karena dengan adanya bantuan tersebut masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk pemeliharaan ternak

sedangkan hasilnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan tersitanya banyak waktu untuk memelihara ternak mengakibatkan masyarakat tidak bisa untuk memperoleh pendapatan dari mata pencaharian yang lainnya.

Tabel IV. 7
Tanggapan Responden Tentang Resiko Sesudah Adanya Program
Bantuan Ternak Kambing K2I di Desa Bandar Sungai

No	Alternatif Jawaban	Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Habisnya waktu untuk memelihara ternak	9	36
2	Mati, karena kurangnya pengetahuan tentang beternak	6	24
3	kewajiban mengganti bantuan ternak bila mati	10	40
Jumlah		25	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang resiko menerima bantuan ternak kambing K2I di Desa Bandar Sungai sebanyak 9 orang atau sebesar 36 % menyatakan waktu mereka habis memelihara bantuan ternak tersebut, sebanyak 6 orang atau 24 % menyatakan bantuan ternak yang diberikan mati karena kurangnya pengetahuan tentang beternak, sedangkan 10 orang atau 40 % responden menyatakan merasa berat dengan adanya bantuan ternak karena beratnya kewajiban untuk mengganti bantuan ternak bila mati.

Untuk itu diperlukannya kerja sama yang sinergis antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan program-program bantuan seperti ini karena sangat membantu dan memiliki prospek yang sangat bagus bila dijalankan dengan baik.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Prograam (K2I) Bantuan Ternak Kambing di Desa Bandar Sungai

1. Prosedur pelaksanaan program (K2I) bantuan ternak kambing dalam Islam

Program K2I merupakan program Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, memberantas kebodohan dan meningkatkan infrastruktur pada umumnya dan kabupaten Siak Khususnya. Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana pembangunan untuk kegiatan pengembangan ternak yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah kebawah yakni masyarakat miskin agar dapat memanimalisir masyarakat yang kurang mampu. Beberapa persyaratan yang diperhatikan terlebih dahulu dalam pelaksanaan kegiatan program K2I bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak adalah Lokasi, Persyaratan perternak, Hak peternak.

Kemiskinan sungguh merupakan bencana, yakni dapat membuat kepala tegak menjadi tunduk, merendahkan jiwa manusia yang mulanya luhur, memudarkan pancaran hati, mengacaukan pikiran, menghamburkan cita harapan, dapat menyeret manusia ke dalam penderitaan dan kesengsaraan dan banyak meninggalkan akhlak dan budi pekerti serta nilai-nilai mulia⁶.

Islam membuat seseorang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, yaitu bertanggung jawab atas kewajiban membebaskannya dari perangai rendah, mencegah diri dari perbuatan khianat, dan mengarahkannya kepada kegiatan bekerja untuk soal-soal keduniaan, serta mengarahkannya

⁶ Shalah Abdul Qadir al-Bakriy, *Al-Qur'an Wabina al-Insan*, diterjemahkan oleh Abu Laila dan Muhammad Tohir dengan judul *Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, h. 128

kepada ketekunan beribadah. Islam bukan hanya agama kerohanian semata-mata yang mengantarkan manusia dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat, tetapi juga merupakan tuntutan hidup yang sempurna bagi manusia, termasuk segala dasar dan landasannya. Islam adalah agama akhirat dan juga agama dunia, agama yang mengandung kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat menuntut adanya kekuatan jasmani, akal pikiran, rajin melakukan pekerjaan yang baik dan gemar berbuat kebajikan⁷. Kemiskinan dapat berakibat, yakni:

- a. Membahayakan akidah, kemiskinan merupakan ancaman yang serius terhadap akidah, terutama kaum miskin yang hidup di lingkungan kaum berada yang berlaku aniaya. Terlebih jika kaum miskin tersebut bekerja dengan susah payah sementara golongan kaya hanya bersenang-senang. Kondisi seperti ini, dapat menebarkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan Allah mengenai pembagian rezki.
- b. Membahayakan akhlak dan moral, yaitu selain berbahaya terhadap akidah dan keimanan, kemiskinan pun berbahaya terhadap moral.
- c. Membahayakan keluarga, yaitu merupakan ancaman terhadap keluarga. Baik terhadap pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya. Kemiskinan merupakan salah satu rintangan besar bagi para pemuda untuk melangsungkan perkawinan seperti terpenuhinya berbagai syarat dan sebagainya⁸.

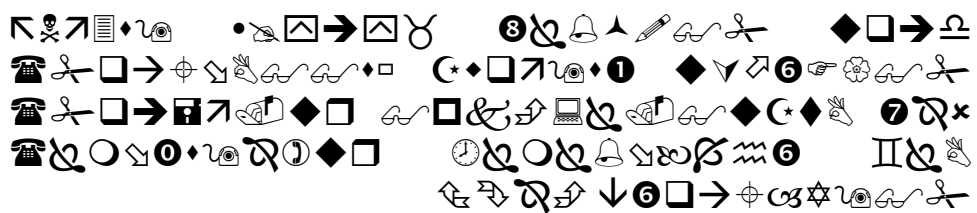
⁷ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 26

⁸ *Ibid*, h. 27

Dengan demikian dapat dipahami bahwa agama tidak menghendaki adanya kemiskinan, karena kemiskinan juga dapat berbahaya terhadap akidah, akhlak, kelangsungan keluarga dan sebagainya, sehingga agama Islam menganjurkan untuk menghindarinya dengan jalan berusaha, bekerja dan sebagainya.

Dalam buku “*the wealth of nations*”, adam smith membedakan tingkat perekonomian masyarakat kepada dua kategori. Pertama, bangsa dan ekonomi terbelakang dan bangsa ekonominya maju. Masyarakat yang ekonominya terbelakang ditandai dengan mata pencarian yang tradisional seperti berburu, sedangkan masyarakat yang ekonominya maju maka mata pencariannya adalah berdagang⁹.

Ekonomi Islam sendiri, ekonomi yang berdasarkan ketuhanan yang tidak lepas dari syariat Allah, Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi impor, ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk tuhan. Kalau orang muslim berkerja dalam bidang produksi maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah¹⁰.



⁹ Mawardi, *Ekonomi Islam*, Alaf Riau: Pekanbaru, 2007, h. 15

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam*, Robbani Press: Jakarta, 2001, h. 29

Artinya:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”(QS. Al-mulk :15).

Islam menuntut supaya setiap orang memberikan sumbangannya sedapat mungkin dalam segala bidang kehidupan, dan menetapkan kewajiban agar setiap orang menginfakkan sebagian dari harta kekayaan di jalan yang benar, menolong kaum fakir miskin, dan untuk melawan kezaliman serta membasmi kedurhakaan¹¹.

2. Pembinaan program (K2I) bantuan ternak kambing dalam Islam

Masyarakat Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabah Auh Kabupaten Siak berharap agar pembinaan program K2I hendaknya terus berjalan dengan berbagai perbaikan-perbaikan disetiap aspek, sehingga mampu meminimalisir tingkat-tingkat kesalahan yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan bantuan ternak kambing dengan sebaik-baiknya.

Ekonomi Islam sendiri terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan Islam. Kata “ekonomi”, berarti perihal pengurus dan mengatur kemakmuran, dan sebagainya¹². Dan kata “syari’ah”, yaitu hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah swt untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam Kitab Suci Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasulullah dalam bentuk

¹¹ Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993, h. 64

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h. 524.

sunnahnya¹³. Jadi ekonomi syari'ah adalah ekonomi atau perihal yang mengurus dan mengatur kemakmuran berdasarkan agama atau aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Islam, atau pengaturan kemakmuran berdasarkan prinsip ekonomi dalam Islam.

Namun demikian ekonomi Islam sebagai kajian yang berdiri sendiri dengan menggunakan ilmu-ilmu modern. Para ilmuwan klasik dan pertengahan banyak diantaranya mempunyai pemikiran-pemikiran ekonomi yang dianggap tetap aktual sampai sekarang, meskipun pada zamannya pemikiran itu belum dianggap sebagai kajian ekonomi. Misalnya Ibnu Taimiyah.

- a. Memenuhi kebutuhan hidup seorang secara sederhana.
 - b. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
 - c. Memberi kebutuhan social dan sumbangan menurut jalan Allah.
3. Mamfaat program (K2I) bantuan ternak kambing dalam Islam

Bantuan ternak kambing dari pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf ekonominya kearah yang lebih baik. Karena jika dilihat dari segi ekonomi, program tersebut sangat baik apabila dikembangkan dan dijalankan secara maksimal (pengawasan, pengontrolan) dengan baik, sehingga dapat memberikan mamfaat bagi perekonomian masyarakat Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabah Auh Kabupaten Siak.

¹³ Nasaruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1989, h. 59

Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari¹⁴. Sistem perekonomian Islam, saat ini dikenal dengan istilah sistem ekonomi. Sistem ekonomi syari'ah mempunyai beberapa tujuan, yakni:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
- c. Mencapai distribusi pendapatannya dan kekayaan yang adil dan merata.
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial¹⁵.

Bangunan ekonomi Islam berdasarkan atas lima nilai universal yakni: tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khlifah (pemerintahan) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan diatas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya¹⁶.

¹⁴ Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika; Jakarta, 2000. h. 3

¹⁵ Gamar Marza, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, UNRI Press; Pekanbaru, 2004. h. 3

¹⁶ *Ibid.* h. 14

Ekonomi Islam memiliki kekhasan, baik dalam tataran konsep maupun operasional. Menurut Yuliadi (2001) hal ini dapat disimak pada pengertian asumsi dasar ekonomi Islam yaitu¹⁷.

a. Naluri Manusiawi

Islam memandang bahwa kepentingan individu dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Karena individu merupakan bagian dari bangunan kehidupan masyarakat secara luas. Kehidupan individu akan terasa nyaman apabila kondisi masyarakat juga mendukung, sebaliknya ekonomi masyarakat sangat dipahami oleh sejauh mana kualitas kehidupan masing-masing individunya. Islam memandang bahwa kehidupan masyarakat ibarat seperti kehidupan dalam "suatu bangunan/tubuh yang satu sama lain saling mendukung dan memperkuat¹⁸.

b. Materi

Islam memandang bahwa materi merupakan dalam kehidupan di dunia ini untuk mencapai kehidupan yang semakin baik dalam kehidupan di dunia sampai akhirat. Sehingga praktek pengolahan dan penggunaan materi senantiasa dalam bingkai moral dan spiritual untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia baik secara fisik maupun moral.

¹⁷ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo; Jakarta, 2007. h. 33

¹⁸ Sholahuddin, *Op. Cit.* h. 34

c. Hak milik

Islam memandang bahwa kepemilikan yang sebenarnya adalah milik Allah Swt. Karena dialah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Sehingga manusia dalam mengelola dan menggunakan semua bentuk materi harus selalu dalam bingkai syari'ah tidak boleh hanya semata-mata perlindungan untung-rugi tanpa memperhatikan tuntutan syari'ah.

d. Universalisme

Islam memandang bahwa manusia pada hakikatnya merupakan satu kesatuan kehidupan yang besar karena semua umat manusia berasal dari satu keturunan yaitu nabi Adam as. Allah Swt sebagai pencipta atas alam semesta ini yang menciptakan sumber daya alam diperuntukan bagi kesejahteraan semua umat manusia bukan hanya untuk suatu golongan masyarakat atau suatu bangsa tertentu. Pandangan ini yang kemudian melahirkan perilaku ekonomi yang ramah dan simpatik karena aktivitas ekonomi senantiasa dibangun dengan prinsip saling tolong-menolong dan saling membantu¹⁹.

¹⁹ Sholahuddin, *Op. Cit.* h. 34

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program K2I dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui usaha peternakan kambing kacang. Pola pemeliharaan kambing kacang adalah secara individu dimana setiap kelompok terdiri dari 10 orang peternak dan setiap kelompok mendapatkan bantuan 100 ekor kambing untuk 10 orang peternak. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan program K2I bantuan ternak kambing di Desa Bandar Sungai yaitu: lokasi, persyaratan peternak, hak peternak. Program K2I yang diperuntukkan untuk masyarakat berekonomi menengah kebawah agar kemiskinan dan kebodohan dapat diminimalisir setelah diberikan pembinaan dan penyuluhan yang diadakan oleh pihak pelaksana sehingga dapat membantu taraf perekonomian masyarakat yang tidak mampu
2. Program K2I diperuntukkan bagi masyarakat miskin, dimana program K2I ini mengandung unsur tolong-menolong sesama manusia karena program ini tidak bersifat pinjaman tetapi bersifat hibah atau pemberian. Memberi dengan sukarela tanpa meminta imbalan apapun, hanya mengharap ridha Allah SWT.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring sesuai dengan petunjuk pelaksanaan juklak kegiatan pendistribusian bibit ternak kambing kacang 2010.
2. Dalam hal pencapaian hasil yang optimal, pemerintah hendaknya memberikan dana pendamping guna sebagai biaya untuk mentalangi perawatan ternak serta kebutuhan masyarakat yang bersangkutan karena mengingat orientasi hasil dari bantuan yang cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmalik, Abdulkarim, Arimullah, *Tafsir Al-Azhra*, Singapura; Karjaya Printing Industries Pte Ltd, 1990, Cet-5.
- Ash Shadr Baqir Muhammad, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Jakarta; Zahra, 2008 Cet-1.
- Al-Bakriy Shalah Abdul Qadir, *Al-Qur'an Wabina al-Insan*, diterjemahkan ole Abu Laila dan Muhammad Tohir dengan judul *Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Azra Azyumardi, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Konstruksi Sosial*, Angkasa Bandung; Bandung, 2008, Cetakan Pertama.
- Bappeda propinsi riau. *Strategi dan arah kebijakan pembagunan propinsi riau*. Pekanbaru:2010
- Chasan Umar Ali, *Al-Qur'an dan Pembangunan Nasional*, CV. Bahagian Batang; Semarang, 1992, Cetakan Pertama.
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, 2010, Petunjuk Pelaksanaan Juklah "Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kambing Kacang Tahun 2010", Pekanbaru.
- Dwiyanto Agus, *Kemiskinan dan Otonomi Daerah*, LIPI Press; Jakarta, 2005.
- Gamar Marza, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, UNRI Press; Pekanbaru, 2004.
- Karim Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, Jakarta: Internasional Institute of Islamic Thought, 2006.
- Kebudayaan dan departemen pendidikan, *kamus besar bahasa indonesia*, jakarta: balai pustaka, 1995.
- Khalid, *Zakat Kontenporer*, Embun Litera Pubhling; Jakarta, 2010.
- Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika; Jakarta, 2000.
- Madjid Nurcholish, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Alaf Riau; Pekanbaru, 2007.

Marzuki Sudiyono, *Program Pengentasan Kemiskinan Dengan Usaha Perternakan Itik Di Kabupaten Malang*, Fakultas Perternakan Universitas Di Ponogoro: Malang, 2005.

Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2007.

Norozzaman, dkk, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: CV.Rajawali 1986, cet-1

Prayitno, Hadi, Santoso budi, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Pustaka Pengetahuan Al-Qur'an, PT. Rahel Publika; Jakarta, 2007, Cetakan Pertama.

P3EI UII , *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008.

Qardhawi Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam*, Robbani Press; Jakarta, 2001.

Razak Nasaruddin, *Dienul Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1989.

RI Depag, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2002.

Ritonga, Rahman, dkk., *Fiqh Ibadah*, Gaya Media Pratama; Jakarta, 1997.

Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo; Jakarta, 2007.

Teguh Ambar,Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Jakarta: Gava Medie 2004.

